

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah. Seiring dengan bertambahnya populasi, pendapatan tambahan dibutuhkan setiap tahun. Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pengembangan ekonomi regional berperan krusial. Pengembangan ekonomi regional merupakan proses di mana pemerintah daerah dan komunitasnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dapat meningkat (Arsyad dalam Saudi, *et.al*, 2021).

Salah satu upaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengaktifkan sektor perekonomian yang melibatkan banyak masyarakat kecil, seperti pemberdayaan UMKM. Hal ini didukung oleh Romadhoni, *et.al*, (2022) yang menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan peluang kerja serta pendapatan. Menurut publikasi Produk Domestik Bruto oleh Badan Pusat Statistik tahun 2024, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen. Selain memperbesar Produk Domestik Bruto (PDB),



juga berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Menteri
1 Sri Mulyani dalam acara BRI *Microfinance Outlook* 2024

mengungkapkan UMKM berkontribusi 97 persen terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Upaya peningkatan kinerja UMKM bertujuan untuk memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kinerja UMKM diharapkan mendorong produktivitas dan nilai tambah sehingga output dan PDRB meningkat, memperluas skala usaha dan menyerap lebih banyak tenaga kerja menurunkan pengangguran serta memperkuat daya beli masyarakat, dan menaikkan omset pelaku usaha untuk memacu konsumsi domestik.

Selain itu, pertumbuhan UMKM menciptakan efek multiplier bagi sektor hulu (pemasok bahan baku) dan hilir (distribusi, transportasi, pemasaran), mendorong inovasi produk dan diversifikasi pasar yang menambah devisa negara, menarik investasi baru dan membentuk klaster industri regional, serta meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan daerah yang dapat diinvestasikan kembali untuk pemberdayaan UMKM (Nanta, *et.al*, 2022).

Secara agregat, kontribusi UMKM cukup besar. Namun, hal ini belum mencerminkan kinerja terbaik dalam persaingan pasar domestik maupun internasional. Beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu rendahnya kemampuan kewirausahaan para pelaku UMKM dalam melakukan inovasi produk, tingkat keahlian yang masih belum memadai dalam menyelesaikan masalah i dan manajemen usaha, keterbatasan jaringan (*network*) yang

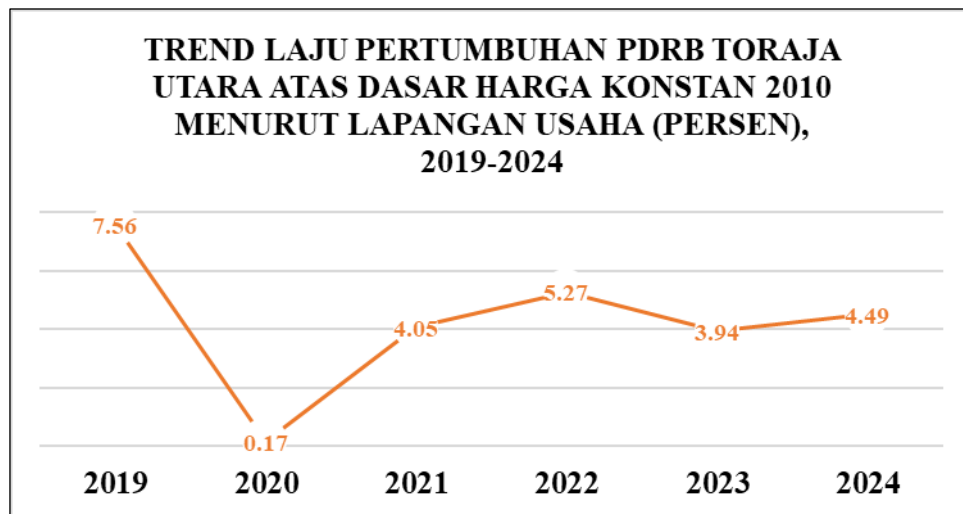


menghambat akses informasi, pasar, dan input, minimnya ketergantungan yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengeksploitasi pasar nasional maupun regional, dan akses keuangan yang kurang mendukung UMKM sehingga menghambat pengembangan usaha ke skala yang lebih besar (Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam Analia, 2020).

Salah satu masalah dalam pengembangan kinerja UMKM selain dari faktor modal alam, faktor modal fisik, dan faktor modal manusia yaitu faktor modal sosial. Kekuatan modal sosial dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan mendukung kinerja UMKM melalui peran yang saling melengkapi. Sinergi antar pemangku kepentingan berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM, sehingga memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional (Agustinaa, *et.al*, 2014).

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Perekonomian di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 didominasi oleh sektor UMKM dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha industri pengolahan. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Toraja Utara mencapai 62,18 persen.





Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara, 2024.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja Utara Atas Dasar Harga Konstan, 2019-2024.

Gambar 1. 1 menunjukkan trend laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 sebesar 4,49 persen, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,02 persen. Meski demikian, angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara pada tahun sebelumnya yang mengindikasikan adanya potensi perbaikan.

Pemangku kepentingan telah mengadakan upaya dalam rangka mengoptimalkan kinerja UMKM selaku penggerak utama perekonomian di Kabupaten Toraja Utara. Namun, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Toraja Utara

wawancara singkat bersama penulis yang mengungkapkan bahwa masalah



yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usahanya yaitu kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha. Selain itu, pertambahan jumlah UMKM memicu persaingan yang semakin ketat, sementara banyak pelaku UMKM masih terbatas memasarkan produknya di pasar lokal karena belum memenuhi standar untuk menembus pasar yang lebih luas.

Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara. Pemangku kepentingan memiliki fungsi krusial dalam mendukung kinerja UMKM melalui peran yang saling melengkapi. Sinergi antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media massa, akademisi, organisasi pengusaha dan bank dan lembaga keuangan lainnya berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM, sehingga memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional (Harini, *et.al*, 2016).

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Toraja Utara, 2024.

No	Bidang Usaha	Jenis Usaha			Total
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Hotel dan Penginapan	62	5	-	67
2	Restoran	38	-	-	38
3	Rumah Makan	588	-	-	588
4	Karaoke/Café	72	-	-	72
5	Kios	7972	-	-	7972
6	Salon	100	-	-	100
7	PT	-	189	-	189
	CV dan Konstruksi	-	651	-	651



9	Jasa	671	-	-	671
10	Tempat Hiburan	13	-	-	13
11	Peternakan	8686	-	-	8686
Total		18202	845	-	19047

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab. Toraja Utara dalam BPS, 2024.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2024 berdasarkan bidang usaha. Total UMKM di Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 berjumlah 20.422 unit, terdiri dari 19.577 usaha mikro, 845 usaha kecil, dan tidak ada usaha menengah. Angka ini mencerminkan potensi ekonomi lokal yang besar. Namun dalam realisasinya, UMKM di Kabupaten Toraja Utara masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Publikasi Badan Pusat Statistik Toraja Utara tahun 2024 mengungkap bahwa lemahnya inovasi produk, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas, mutu, dan keamanan produk, serta strategi pemasaran dan penjualan yang kurang efektif, menjadi faktor utama pengelolaan usaha produktif belum maksimal.

Dalam rangka mengatasi temuan BPS Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 tentang hambatan peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara, yaitu lemahnya inovasi, rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai peningkatan kualitas, mutu, dan keamanan produk, kurang efektifnya strategi pemasaran, serta keterbatasan keterampilan dan ketatnya persaingan sebagaimana diungkap oleh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Toraja Utara,

n sinergi penuh antar pemangku kepentingan. Kolaborasi komprehensif



antar pemangku kepentingan diharapkan akan meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara secara berkelanjutan.

Analisis ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana gambaran strategi atau usaha optimalisasi peran *stakeholders* dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara. Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Analia, (2020) yang hanya menitikberatkan optimalisasi *stakeholders* pada instansi pemerintah dan pendamping UMKM, dalam penelitian ini akan menganalisis optimalisasi peran *stakeholders* melibatkan spektrum pemangku kepentingan lebih luas yaitu pemerintah kabupaten, lembaga keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, organisasi pengusaha, dan media massa.

Dari data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang ***“Optimalisasi Peran Stakeholders dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kecenderungan kriteria peran *stakeholders* dalam peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana strategi peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara yang didukung oleh *stakeholders*?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bobot kecenderungan kriteria peran *stakeholders* dalam peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara yang didukung oleh *stakeholders*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi para *stakeholders*, pelaku usaha dan masyarakat sebagai acuan dalam merumuskan strategi atau usaha optimalisasi peran *stakeholders* dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Toraja Utara.
2. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait topik penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok kecil dengan modal dan pendapatan yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di banyak negara, UMKM menjadi fondasi ekonomi karena jumlahnya yang banyak dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ciri khas UMKM meliputi struktur organisasi yang sederhana, modal usaha yang relatif kecil, dan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Para pelaku UMKM umumnya memiliki kedekatan langsung dengan konsumen serta modal sosial yang kuat di lingkungan komunitasnya. Kondisi ini memudahkan pelaku UMKM berinovasi, menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan lokal, dan membangun jaringan usaha yang solid.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat besar. Sektor ini tidak hanya menyerap sebagian besar tenaga kerja, terutama di kawasan pedesaan dan kota kecil, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah berwirausaha. Keberadaan UMKM mendorong pertumbuhan industri



penunjang, memperluas basis usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sumber pendapatan

Untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan dan kebijakan khusus, seperti penyediaan akses keuangan yang lebih mudah, pelatihan dan pendampingan, serta insentif pajak. Selain itu, adanya jaringan kerja sama antara UMKM, lembaga keuangan, dan pemerintah dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

2.1.2 Teori *Resource Based View* (RBV)

Resource Based View (RBV) pertama kali diperkenalkan oleh Wenerfelt pada tahun 1984. Teori ini memandang sumber daya internal dan kecakapan suatu usaha sebagai dasar utama bagi daya saing dan kinerjanya. Asumsi utama dari teori *RBV* adalah bahwa kemampuan suatu usaha untuk bersaing dengan usaha lain ditentukan oleh cara usaha tersebut mengelola sumber daya internal yang dimilikinya, serta kecakapan dalam memperoleh keunggulan kompetitif.

Dalam teori RBV, sumber daya internal suatu usaha dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai peningkatan kinerja. Sumber daya yang bernilai, sulit untuk ditiru, dan tidak dapat digantikan oleh pesaing akan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi suatu usaha. Dengan memanfaatkan sumber



daya internal, baik itu sumber daya fisik seperti modal berwujud maupun sumber daya manusia secara efektif, suatu usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat mempertahankan posisi yang kuat di pasar.

Teori RBV menekankan bahwa kinerja suatu usaha ditentukan oleh sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Alzahrani dan Susanty dalam Feroz dan Serly (2025) menjelaskan bahwa tidak semua sumber daya dapat memberikan keunggulan kompetitif, hanya sumber daya yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat dipindahkan yang dapat berkontribusi pada kinerja superior. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), teori ini relevan karena UMKM sering kali memiliki sumber daya yang terbatas dan harus mengelola aset yang ada dengan efisien untuk bersaing di pasar.

Teori ini didukung oleh teori kemampuan dinamis yang merupakan salah satu sumber daya penting yang dapat mendukung UMKM untuk beradaptasi dan berinovasi. Kemampuan dinamis mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk membangun, mengintegrasikan, dan merekonfigurasi sumber daya internal dan eksternal dalam menanggapi perubahan lingkungan. Teece dalam Feroz dan Shely (2025) mengemukakan bahwa kemampuan dinamis terdiri dari tiga elemen utama: kemampuan untuk merasakan perubahan di lingkungan; kemampuan untuk



memanfaatkan perubahan tersebut; dan kemampuan untuk mengintegrasikan serta merekonfigurasi sumber daya.

Kemampuan merasakan (*sensing*) melibatkan identifikasi dan evaluasi peluang serta ancaman di pasar. Perusahaan dengan kemampuan sensing yang baik akan mampu mengenali tren pasar, kebutuhan pelanggan, serta inovasi teknologi dengan cepat. Kedua, kemampuan memanfaatkan (*seizing*) adalah kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang telah diidentifikasi. Ini mencakup pengembangan dan implementasi strategi yang efektif untuk memanfaatkan peluang pasar dan mengatasi ancaman yang ada. Proses ini mungkin melibatkan investasi dalam teknologi baru, pengembangan produk baru, atau restrukturisasi organisasi. Ketiga, kemampuan mengkonfigurasi ulang (*reconfiguring*) merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mereorganisasi dan menyesuaikan sumber daya serta kapabilitas yang ada agar sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Ini mencakup penyesuaian struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan pembaruan proses bisnis agar perusahaan tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Teori kemampuan dinamis relevan dalam konteks UMKM yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Perusahaan yang mampu mengembangkan kemampuan dinamis akan lebih siap menghadapi perubahan pasar dan mengatasi tantangan yang muncul, sehingga mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka



panjang. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, kemampuan dinamis menjadi faktor krusial untuk keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan.

2.1.3 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder*, yang pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, merupakan teori yang menekankan pentingnya memperhatikan dan mengelola kontribusi berbagai pihak eksternal yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh suatu usaha. *Stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu usaha.

Fassin dalam Subroto dan Endaryati, (2024) mengategorikan pemangku kepentingan menjadi tiga kelompok yaitu pemangku kepentingan nyata, pemangku kepentingan representatif, dan pemangku kepentingan pengatur. Pemangku kepentingan nyata mencakup individu dan kelompok yang memiliki kepentingan langsung pada UMKM, seperti pemilik usaha, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Mereka memiliki hak dan pengaruh yang sah atas kebijakan serta operasional UMKM sehingga entitas berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kesejahteraan mereka.

Pemangku kepentingan representatif terdiri atas organisasi atau asosiasi yang bertindak sebagai perwakilan pemangku kepentingan nyata. Contohnya swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak konsumen dan organisasi



lingkungan yang melindungi kepentingan komunitas. Meskipun tidak memiliki kepentingan langsung, kelompok ini memperoleh kekuatan dari legitimasi representasi serta peran pengawasan yang mereka jalankan.

Pemangku kepentingan pengatur meliputi regulator independen, antara lain pemerintah daerah, lembaga peradilan, badan pengawas, serta pers dan media. Mereka tidak memiliki kepentingan usaha, tetapi mengatur, memantau, dan menegakkan standar operasional UMKM. Kepatuhan pada regulasi yang ditetapkan oleh kelompok ini akan memengaruhi reputasi, akses permodalan, dan kelangsungan usaha.

Dalam konteks UMKM, sinergi ketiga kelompok pemangku kepentingan tersebut menjadi penentu peningkatan kinerja. Pemangku kepentingan nyata memberikan modal sosial dan dukungan operasional, pemangku kepentingan representatif memperkuat legitimasi serta advokasi, sedangkan pemangku kepentingan pengatur memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, UMKM yang mampu mengelola hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan akan lebih mudah memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan tumbuh berkelanjutan.

2.1.4 Pendekatan *Hexa Helix*

Hasil penelitian oleh Rachim, *et.al*, (2020) menunjukkan bahwa komunitas lampak (*affected communities*) layak ditempatkan sebagai salah satu



stakeholders, selain pemerintah, dunia usaha, akademis, LSM, dan media massa. Konsep enam *stakeholders* ini disebut *hexa helix*. Model ini dirancang untuk menciptakan inovasi dan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang beragam. Menurut Firmansyah, *et.al*, (2021), peran dari keenam *stakeholders* dalam model hexa helix yaitu:

1. Akademisi berperan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi dalam model *Hexa Helix*. Universitas dan lembaga pendidikan menyediakan penelitian dan pengembangan yang dapat diaplikasikan untuk mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Selain itu, akademisi juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat serta *stakeholders* lainnya, sehingga transfer pengetahuan dan teknologi dapat terjadi secara efektif.
2. Pemerintah merupakan *stakeholder* yang memiliki peran strategis dalam menyediakan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM dengan memberikan insentif, dukungan finansial, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai inisiatif dan program yang melibatkan *stakeholders* lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Organisasi pengusaha merupakan sebuah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha yang dibentuk secara sah untuk mewakili kepentingan dunia



usaha, baik dalam hubungan industrial maupun dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis. Organisasi pengusaha dapat dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau karakteristik tertentu.

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan masyarakat. LSM memberikan dukungan kepada komunitas dalam bentuk advokasi, pemberdayaan, dan bantuan teknis. Selain itu, LSM juga membantu menghubungkan komunitas dengan *stakeholders* lainnya untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.
5. Media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Media membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang inovasi, kebijakan, dan program-program yang sedang berjalan. Selain itu, media juga berperan dalam mempromosikan UMKM dan inisiatif lokal lainnya kepada audiens yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan visibilitas dan citra positif UMKM di mata konsumen.
6. Lembaga keuangan merujuk pada institusi finansial yang menyediakan akses modal berupa kredit, pinjaman, dan produk keuangan lain yang dirancang khusus untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan ini membantu UMKM mengembangkan usahanya melalui ekspansi, peningkatan produktivitas, serta penguatan struktur keuangan



usaha. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen yang digunakan, di mana persyaratan pinjaman disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh UMKM.

2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu mengenai optimalisasi peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

Penelitian yang dilakukan oleh Analia, (2020) menggunakan metode *Matrix of Alliance and Conflict: Tactics, Objective and Recommendation (MACTOR)* menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja UMK. Hubungan antar stakeholder menciptakan konvergensi dan divergensi. Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Pendamping UMKM menunjukkan konvergensi yang sangat kuat dalam meningkatkan kinerja UMK. Kedekatan objektif dalam meningkatkan kinerja UMK adalah peran modal sosial rasa percaya dan jaringan. Hal ini memudahkan aliran informasi dan keberlanjutan UMK sehingga peningkatan motivasi, peningkatan keterampilan pelaku usaha, dan inovasi perlu dilakukan agar produk mampu menguasai pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah, *et.al*, (2020) menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS) menunjukkan bahwa variabel modal manusia berpengaruh secara langsung terhadap variabel orientasi pasar dengan koefisien sebesar 86,8 persen, yang artinya ketika variabel modal manusia



ditingkatkan sebesar satu kali, maka variabel orientasi pasar akan meningkat sebesar 86,8 persen. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan konsep modal manusia akan meningkatkan orientasi pasar yang lebih tinggi dibanding UMKM yang tidak menerapkan konsep modal manusia. Modal manusia berpengaruh terhadap orientasi pasar, modal manusia berpengaruh terhadap kinerja UMKM, dan orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyani, *et.al*, (2021) menggunakan alat analisis uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis linear berganda menunjukkan bahwa model manajemen keuangan, kompetensi sumber daya manusia, strategi pemasaran tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM. Namun, dukungan pemerintah dan usia usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, *et.al*, (2023) menggunakan analisis uji asumsi klasik dan regresi menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, dan literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.

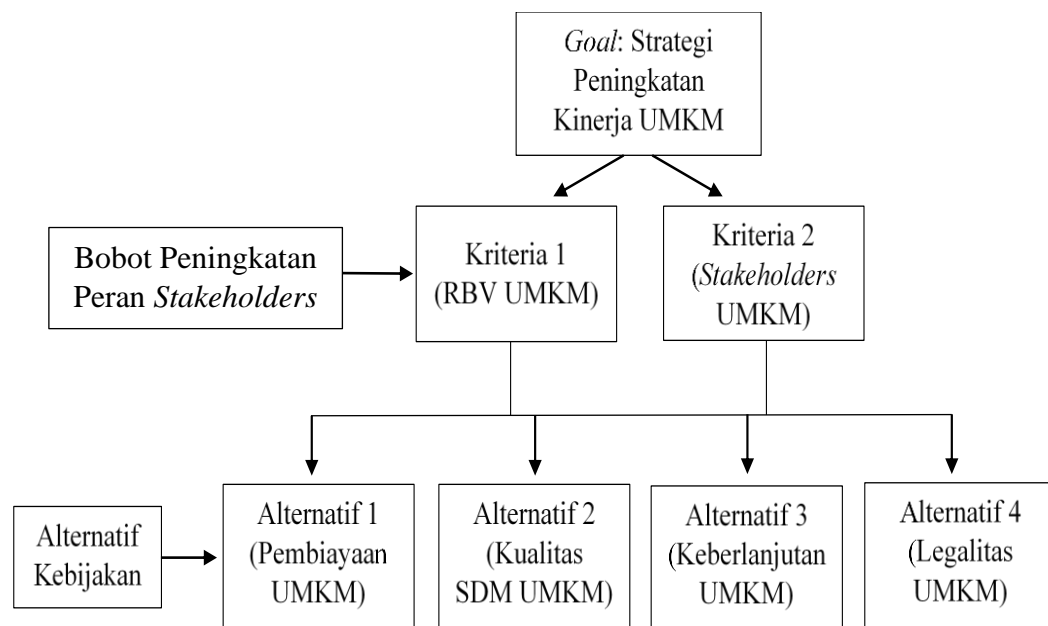
Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Martini, (2024) menggunakan aplikasi *Smart PLS* menunjukkan bahwa UMKM dapat
tukan keuntungan secara signifikan dengan memanfaatkan teknologi



keuangan. Fenomena ini terjadi dengan sendirinya, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inklusi keuangan dan literasi keuangan. Literasi dalam bidang keuangan dan partisipasi dalam sistem keuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan UMKM, dan dampaknya dapat bermanfaat atau negatif. Inklusi keuangan beserta literasi keuangan berhasil mengurangi pengaruh teknologi keuangan terhadap kinerja UMKM.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

